



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2023 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun pertama dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Padang Tujuh, 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pasaman Barat



HERMANTO
NIP.196510041988021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS TAHUN 2021 ..	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	41
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	53
BAB III TUJUAN dan SASARAN.....	56
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	57
3.3 Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	78
BAB V PENUTUP.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

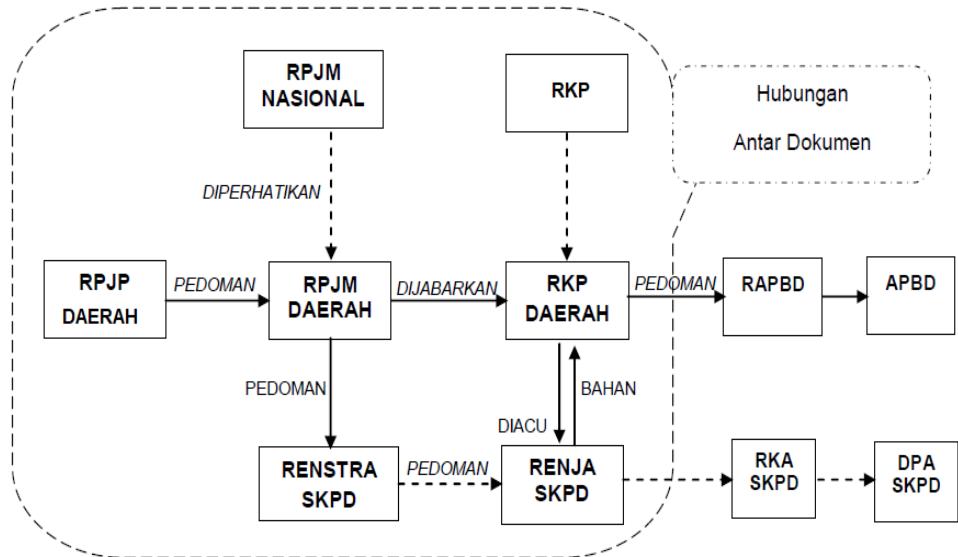
Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat. mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKP dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2023;
3. Program / Kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD). Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Rencana Kerja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Sosial memuat kebijakan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, program dan kegiatan Dinas Sosial, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022 dan 2023.

Keterkaitan antara Renaja Dinas Sosial dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- 18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat agar dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yaitu Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023

2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Sosial dengan Target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam program perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperi tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos*

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas sosial*

Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota

serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.6 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.7 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-assosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang

langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial*

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 *Program dan Kegiatan*

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir), uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**BAB V : PENUTUP**

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial pada tahun 2021 memuat pencapaian target tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat menjalankan 6 (Enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar Rp. 4.917.917.086,- (Empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh enam rupiah). Dari Pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 4.293.798.422,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan persentase realisasi sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar 87,31%.

Anggaran Dinas Sosial tahun 2021 dibagikan pada 3 (tiga) bidang, 1 (satu) sekretariat yang digunakan untuk membiayai/mendanai 5 (lima) program. Berikut rincian realisasi Kelima program tersebut adalah i berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 3.054.677.878,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.633.956.722,- atau 88,32 % dengan realisasi fisik sebesar 100%
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 808.424.170,- dengan realisasi sebesar Rp. 683.062.000,- atau 84,49% dengan realisasi fisik 100%
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.689.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.517.700,- atau 94,34 % dengan realisasi fisik sebesar 100%;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu dana sebesar Rp. 260.651.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 238.607.400,- atau 91,54% dengan realisasi fisik sebesar 100%;
5. Program Penanganan Bencana dengan pagu dana sebesar Rp. 376.077.958,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 335.687.150,- atau 89,26% dengan realisasi fisik 100%;
6. Program Kawasan Permukiman dengan pagu dana sebesar Rp. 295.896.830,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.274.555.950,- atau 92,79% dengan realisasi fisik 100%.

Capaian indikator kinerja keseluruhan pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan sudah bisa dikatakan dalam kategori berhasil walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Realisasi Fisk dan Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	3.054.677.878	100	2.633.956.722	88,32		
		Nilai SAKIP						
		Level Maturitas SPIP						
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	1.800.000	100	1.497.500	83,19		
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	100	1.497.500	83,19		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	2.499.253.688	100	2.354.197.021	94,2		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	2.130.273.688	100	2.025.002.021	95,06		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	293.280.000	100	254.915.000	86,89		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	75.600.000	100	74.280.000	98,25		
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN Pengamanan Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Sosial	4.397.500	100	-	-		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah uang makan petugas piket malam Non PNS(THL) yang melaksakan pengamanan BMD pada Dinas Sosial	4.397.500	100	-	-		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	4.397.500	100	22.317.000	47,18	karena adanya kesalahan dalam pempartan rekening belanja	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	19.550.000		-	-		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	27.748.000	100	22.317.000	80,43		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	0		-	-		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	265.089.140	100	190.494.300	71,86		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kator	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	0		-	-		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	46.436.600	100	45.334.000	97,63		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.990.066	100	11.558.000	77,1		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27.850.000	100	23.690.500	85,06		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	175.812.474	100	109.911.800	62,52		
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.742.610	100	88.730.000	99,99		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan mesin	88.742.610	100	88.730.000	99,99		
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	75.396.940	100	50.266.551	66,67		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	42.246.940	100	25.616.551	60,64		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	33.150.000	100	24.650.000	74,36		
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	72.700.000	100	37.501.350	51,58		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	57.600.000	100	35.571.350	61,76		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pembayaran pajak dan KIR. 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas operasional atau lapangan	15.100.000	100	1.930.000	12,78		
II	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase terlaksananya program Pemberdayaan Sosial	808.424.170	100	683.062.000	84,49		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
A.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial	800.904.170	100	683.062.000	84,49		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	559.670.670	100	501.822.250	89,66		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	134.978.000	100	117.924.000	87,37		
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Tenaga kesejahteraan	106.255.500	100	63.315.750	59,59		
III	Program Rehabilitasi Sosial	Percentase terlaksananya program rehabilitasi Sosial	73.689.000	100	69.517.700	94,34		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Percentase terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan, anak dan korban sosial lainnya	73.689.000	100	69.517.700	94,34		
1	Penyediaan Sandang	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	11.418.000	100	8.948.250	78,37		
2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	19.762.000	100	18.451.300	93,37		
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah bantuan bagi Mayat terlantar	42.509.000	100	42.118.150	99,08		
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah bantuan bagi Penyandang Disabilitas	0		-	-		
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pemberian Bantuan pada Peringatan hari - hari besar	260.651.250	100	238.607.400	91,54		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang telah dikelola	260.651.250	100	238.607.400	91,54		
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir miskin pada Aplikasi SIKS NG	67.455.000	100	63.791.550	94,57		
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang telah dikelola	193.196.250	100	174.815.850	90,49		
V	Program Penanganan Bencana	Persentase terlaksananya program penanganan bencana	376.077.958	100	335.687.150	89,26		
A	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagan bencana	376.077.958	100	335.687.150	89,26		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN	TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI			KET	
				FISIK	KEUANGAN			
					Rp	%		
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah koordinasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Taruna Siaga	376.077.958	100	335.687.150	89,26		
VI	Program Kawasan Permukiman	Jumlah penataan kawasan pemukiman	295.896.830	100	274.555.950	92,79		
A	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah penataan kawasan pemukiman	295.896.830	100	274.555.950	92,79		
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah yang telah di rehabilitasi	295.896.830	100	274.555.950	92,79		
	JUMLAH		6.657.581.882	4.949.717.086		4.299.466.922	86,86	

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial. Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Adapun informasi yang didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dibawah 75%, adalah :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Karena adanya Kesalahan Rekening pada perjalanan dinas sehingga tidak dapat direalisasikan.
2. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD adanya sisa anggaran pada Perjalanan Dinas dan BBM karena adanya kondisi Covid-19
3. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena ada anggaran yang tidak terealisasi pada jasa tenaga kebersihan.
4. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adanya beberapa item rekening yang tidak terealisasi karena ada beberapa kendala seperti untuk pemeliharaan kendaraan yang TS nya tidak dsetujui oleh Bupati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pencapaian target OPD diantaranya adalah :

1. Karena adanya Kondisi Covid-19
2. Adanya Recofusing Anggaran
3. Terlambatnya Pengesahan Anggaran
4. Adanya Kesalahan Rekening
5. tidak sesuainya biaya belanja barang yang telah direncanakan

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.1.2 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Kode				Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n kegiata n s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	0	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai							
1	0	0	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan							
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	21 Orang		18 PNS	18 PNS	100	25 Pns	43
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	3 Orang PTT 26 Orang THL		3 Orang PTT 21 Orang THL	3 Orang PTT 21 Orang THL	100	3 Orang PTT 21 Orang THL	48
													48,84
													60,42

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	50,00
1	0	0	2.0	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional								
1	0	0	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran								

Kode						Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	0	0	1	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Sosial yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2020; LAKIP Tahun 2020)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Sosial								
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DINAS SOSIAL	1 Orang THL		1 Orang THL	0	-	1 Orang THL	1 Orang THL	100,00
1	0	0	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek								
1	0	0	1	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 Orang		2 Orang	2 Orang	100	4 Orang	6 Orang	50,00

Kode				Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				dan Fungsi	Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)								
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	18 orang		16 orang	16 orang	100	18 orang	34 Orang	52,94
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	2 Orang		2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	4 Orang	-
1	0	0	2.0	6	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Jumlah rapat-rapat						

Kode		Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				koordinasi dalam dan luar daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket	1Paket	2 Paket	50,00
1	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	50,00
1	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Sosial yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	50,00

						Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
Kode			Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1	0	0	2.0 6	1 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100	12 Kali	24 Kali 50,00
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor						
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100	6 Unit	11 Unit 27,27

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	0	0	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor								
1	0	0	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	50,00
1	0	0	2.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 Orang THL	3 Orang THL	2 Orang THL	66	3 Orang THL	5 Orang	40,00
1	0	0	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara							

Kode						Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n kegiata n s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
										Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
1	0	0	2.0	01	6	1	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1. 18 Unit (6 unit kendaraaan roda 5 dan 25 unit kendaraan roda 2) 2. 1 Orang THL		1. 18 Unit (6 unit kendaraaan roda 5 dan 25 unit kendaraan roda 2) 2. 1 Orang THL			1. 18 Unit (6 unit kendaraaan roda 5 dan 25 unit kendaraan roda 2) 2. 1 Orang THL	36 Unit	50,00
1	0	0	2.0	06	6	1	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	52 Unit		52 Unit		52 Unit	52 Unit	100,00	
1	0	0	0	0	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase terlaksananya program penanggangan bencana								

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1	0	0	2.0	1	Kegiatan Penyelenggaraaan Pemberdayaan Masyarakat terhadapa Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagan bencana									
1	0	0	2.0	1	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah koordinasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Taruna Siaga	150 Kali		50 Kali	50 Kali	100	150 Kali	200 Kali	75,00
1	0	0	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase terlaksananya program rehabilitasi Sosial									
1	0	0	2.0	1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Persentase terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban eksplorasi, perdagangan peerempuan,									

Kode		Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n kegiata n s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
Panti Sosial	anak dan korban sosial lainnya												
1 0 6 4	0 4	2.0 1	02	Penyediaan Sandang	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	3 kali penyediaan		3 kali penyediaan	3 kali penyediaan	100	3 kali penyediaan	6 kali penyediaan	50,00
1 0 6 4	0 4	2.0 1	03	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pelayanan Reunifikasi yang yang di Fasilitasi	6 kali		6 kali	6 kali	100	8 Kali	14 Kali	42,86
1 0 6 4	0 4	2.0 1	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah bantuan bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang		30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	60 Orang	50,00
1 0 6 4	0 4	2.0 1	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberian Bantuan pada Peringatan hari - hari besar	3 Paket		3 Paket	0	-	3 Paket	3 Paket	100,00

Kode					Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n kegiata n s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	0	0	0	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase terlaksananya program Pemberdayaan Sosial								
1	0	0	0	2.0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial								
1	0	0	0	2.0	01	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	33	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00
1	0	0	0	2.0	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	6 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	50	6 Kegiatan	9 Kegiatan	66,67

Kode						Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	0	0	2	2.0	05	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Tenaga kesejahteraan	6 Kegiatan		6 Kegiatan	2 Kegiatan	33	6 Kegiatan	8 Kegiatan	75,00
1	0	0	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase terlaksananya program penanggulangan bencana								
1	0	0	6	5	2.0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang telah dikelola								
1	0	0	6	5	2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir miskin pada Aplikasi SIKS NG	92.671 Data		92.671 Data	92.671 Data	100	92.671 Data	185.342 Data	50,00
1	0	0	6	5	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang telah dikelola	69.194 Data		69.194 Data	69.194 Data	100	69.194 Data	138.388 Data	50,00

Kode		Nama Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n kegiata n s/d Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Derah Tahun Berjalan (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Kawasan Permukiman								
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah penataan kawasan pemukiman								
		Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah yang telah di rehabilitasi	-		15 Unit	15 Unit	100	0	15 Unit	-
TOTAL :								-			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Pada RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah pada misi 4 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni : Penerapan Tatakelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif, Menanggulangi Kemiskinan Melalui Penyediaan Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan, sasaran dan target indikator yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dan Taget tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Peningkatan Nilai Sakip		BB	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
2	Level Maturitas SPIP		2,6	3	3	3	3	2,6	2,6	3	3	
3	Persentase Penurunan Temuan BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Indeks Gini		0,251	0,257	0,256	0,255	0,253	0,26	0,28	0,015	0,020	
5	Persentase Penduduk Miskin		6,58	07.02	07.00	6,96	6,84	7,51	7,60	0,56	0,50	

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
6	LKS Anak Binaan, LKS Lanjut Usia Binaan, LKS Penyandang Disabilitas Binaan, karang Taruna aktif yang Dibina		12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	4 LKS	5 LKS	8 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	12 LKS, 1 Skala Kabupaten, 30	
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuan dasarnya diluar Panti	100%	100%	75	80	90	100	75	80	90	100	
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%	75	80	90	100	75	80	90	100	

NO	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
9	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	75	80	90	100	75	80	90	100	

Untuk bidang sosial standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka capaian kinerja berdasarkan SPM bidang sosial tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Pasaman Barat

N O	Indikator Sasaran/ IKU Perangkat Daerah	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n Ana lisi
				Tahun 2021	Tahu n 2022	Tah un 202 3	Tahu n 2024	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100%		75%	85	95%	100%	9.09 %	85%	100%	100 %		
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%		75%	85	95%	100%	100 %	25%	100%	100 %		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%		75%	85	95%	100%	75%	85%	100%	100 %		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%		75%	85	95%	100%	75%	85%	100%	100 %		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%		75%	85	95%	100%	100 %	100 %	100%	100 %		

Kinerja pelayanan Dinas Sosial tahun 2021 dapat tergambar dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021. SPM mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Sosial terdapat lima jenis pelayanan bagi daerah kabupaten / kota yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di laur panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM saat ini mengalami perubahan dibanding konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target merupakan kinerja program sosial, sedangkan SPM saat ini pencapaian target-target menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.

Uraian antara target dan realisasi terurai sebagai berikut :

1. **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti**

Dalam tahun 2021 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti masih sangat rendah karena realisasi pada tahun 2021 sebesar 9,09% dari target capaian daerah sebesar 100%, dimana jumlah disabilitas terlantar diluar yang terbantu sebanyak 42 orang dari 462 orang penyandang disabilitas terlantar diluar panti.

2. **Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti**

Cakupan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial cukup tinggi dengan realisasi sebesar 100 % dari target capaian daerah sebesar 100% setiap tahun, dimana jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 6 orang dari 6 orang jumlah anak terlantar diluar panti.

3. **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**

Dalam tahun 2021 rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti termasuk kategori sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% dari target capaian

4. **Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.**

Untuk tahun 2021 rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, realisasi sebesar 100 % dari capaian realisasi sebesar 100% pertahun. Dimana pada tahun 2021 ada 3 Orang yang mana 3 tersebut telah ditindak lanjuti.

5. **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.**

Pada tahun 2021 pencapaian sudah sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% dari target capaian daerah sebesar 100%, dimana jumlah korban bencana yang ada sebanyak 359 kejadian bencana dengan jumlah korban sebanyak 359 Jiwa dan telah ditanggapi dan diberikan jaminan sosial oleh Bidang Bantuan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pasaman Barat. Isu-isu yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pelayanan sosial masyarakat memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data by name by address yang lengkap
2. Banyak Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia, gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, namun cakupan penanganan (rehabilitasi, jaminan dan pemberdayaan sosial masih rendah)
3. Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan fasilitas bantuan jaminan sosial seperti askes (BPJS)
4. Belum semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat penanganan yang optimal
5. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu sebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
6. Ancaman bencana alam dan sosial akibat kondisi geografis daerah seperti banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya.
7. Pemberian bantuan kepada penyandang Disabilitas berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan untuk alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan lain mendukung penyandang disabilitas bisa mandiri dan berusaha.
8. Terdapat masyarakat yang layak menerima bansos tidak menerima bansos atau sebaliknya, terdapat PBI-JK yang dinonaktifkan dan data anggota keluarga yang tercecer penerima PBI-JK. Program sembako/BPNT sering terdapat saldo Nol/kartu Ganda.

Sedangkan Sasaran besar lainnya yang hendak dicapai dalam pembangunan bidang Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah :

- a. Meningkatnya peran organisasi sosial dalam pelayanan sosial terhadap PPKS
- b. Meningkatnya kemampuan penyandang cacat dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar
- c. Meningkatnya perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan anak jalanan)
- d. Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin
- e. Meningkatnya kondisi puluh psikologi traficking dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- f. Terlaksananya pelayanan dan bantuan sosial secara cepat dan tepat kepada korban bencana alam selama masa tanggap darurat.

Dalam mengamati isu-isu penting tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan koordinasi dan

sinergi program dengan lintas OPD/Lembaga teknis yang terkait dengan Bidang Sosial di Kabupaten Pasaman Barat melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum dapat dikatakan optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun Rencana kegiatan Dinas Sosial tetap mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/prioritas Dinas yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya pekerjaan mendesak yang harus dilaksanakan disebabkan adanya program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang harus juga dilakukan. hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

OPD ; Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,349,927,979	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,349,927,979	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,264,027,979	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,264,027,979	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah				1,980,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah				1,980,000	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Sosial yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2023; LAKIP Tahun 2023)	4 Dokumen	1,980,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Sosial yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD Tahun 2023; LAKIP Tahun 2023)	4 Dokumen	1,980,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	4	5	6 3,131,313,687	7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	9	10	11 3,131,313,687	12
2											
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	18 Orang	2,533,463,687	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	18 Orang	2,533,463,687	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	38 Orang	585,805,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	38 Orang	585,805,000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	12,045,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	12,045,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5,500,000	
6	Pengamanan barang milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Orang	5,500,000	Pengamanan barang milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Orang	5,500,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21,518,750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21,518,750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	4 Orang	6,325,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	4 Orang	6,325,000	
8	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	5,500,000	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	5,500,000	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	4 Orang	9,693,750	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	4 Orang	9,693,750	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				33,978,908	Administrasi Umum Perangkat Daerah				33,978,908	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	7,034,408	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	1 Paket	7,034,408	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	8,739,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 Paket	8,739,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	5,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	1 Paket	5,500,000	
1 3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	6,105,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	1 Paket	6,105,000	
1 4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	30 Kali	6,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	30 Kali	6,600,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11,000,000	
1 5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	11,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	11,000,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49,936,634	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49,936,634	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	46,471,634	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	12 Bulan	46,471,634	
1 7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	3,465,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan umum kantor	12 Bulan	3,465,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,800,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,800,000	
1 8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan	20 Unit	3,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan	20 Unit	3,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kendaraan					kendaraan			
19	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1 Paket	3,000,000	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1 Paket	3,000,000	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	20 Unit	5,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	25 Unit	5,500,000	
2	Program Pemberdayaan Sosial				376,200,000	Program Pemberdayaan Sosial				376,200,000	
9	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota				376,200,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota				376,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	6 Kegiatan	110,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerjasama dengan LKKS yang dilaksanakan	6 Kegiatan	110,000,000	
2 2	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	4 Kegiatan	101,200,00	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Pekerja Sosial	4 Kegiatan	101,200,00	
2 3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Tenaga kesejahteraan	6 Kegiatan	165,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Potensi Tenaga kesejahteraan	6 Kegiatan	165,000,000	
3	Program Rehabilitasi Sosial				352,000,000	Program Rehabilitasi Sosial				352,000,000	
1 0	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut				352,000,000	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak				352,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3	4	5	6	7 Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	8	9	10	11	12
2 4	Penyediaan Sandang	Kab. Pasaman Barat	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	3 Kali Penyediaan	77,000,000	Penyediaan Sandang	Kab. Pasaman Barat	Frekuensi Penyediaan Sandang dilaksanakan	3 Kali Penyediaan	77,000,000	
2 5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	100%	165,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	100%	165,000,000	
2 6	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	3 Paket	110,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pasaman Barat	Persentase pelayanan Reunifikasi yang di Fasilitasi	3 Paket	110,000,000	
2 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pemberian Bantuan pada Peringatan hari - hari besar	3 Paket	110,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pemberian Bantuan pada Peringatan hari - hari besar	3 Paket	110,000,000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				247,700,000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				247,700,000	
1 1	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				247,700,000	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan				247,700,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data Fakir miskin pada Aplikasi SIKS NG	92.671 Data	121,200,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data Fakir miskin pada Aplikasi SIKS NG	92.671 Data	121,200,000	
29	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data PMKS yang telah dikelola	69.194 Data	126,500,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Data PMKS yang telah dikelola	69.194 Data	126,500,000	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				110,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				110,000,000	
12	Kegiatan Penyelenggaraaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				110,000,000	Kegiatan Penyelenggaraaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				110,000,000	
30	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah koordinasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Taruna Siaga	50 Kali	110,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pasaman Barat	Jumlah koordinasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Taruna Siaga	50 Kali	110,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH				-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH			-		
1 3	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-		
3 1	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penataan kawasan pemukiman	70 Unit		Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pasaman Barat	Jumlah penataan kawasan pemukiman	0		
TOTAL					4,349,927,979					4,349,927,979	

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Sosial, usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 pada Dinas Sosial. Untuk Tahun 2023 ada 13 usulan kegiatan masyarakat hasil Musrembang Kecamatan Tahun 2023 yang menjadi Prioritas daerah dapat disajikan dalam tabel 2.5.1

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Sosial

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol ume	Catatan
1						2	3	4	5	6
1	0 6	0 2				Program Pemberdayaan Sosial				
1	0 6	0 2	2.0 3			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
1	0 6	0 2	2.0 3	0 1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota				
1	0 6	0 2	2.0 3	0 1	0 1	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Dapil 1	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	200.000.000 / 200 Orang	Pokir Supriono
1	0 6	0 2	2.0 3	0 1	0 2	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Sungai Aur	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	150.000.000 / 50 KK	Pokir Drs. EREFRIWAN
1	0 6	0 2	2.0 3	0 1	0 3	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Dapil 1	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	150.000.000	Pokir PUSPITA SYERLI INDAH SARI, SH
1	0 6	0 2	2.0 3	0 1	0 4	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Sasak Ranah Pasisie	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan	100.000.000	Pokir YAMA ENDRA PUTRA, S.Pi

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol ume	Catatan	
1						2	3	4	5	6	
								masyarakat			
1	0	0	2	2.0	0	0	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Sungai Beremas	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	200.000.000	Pokir MEILIZAR, SH
1	0	0	2	2.0	0	0	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Dapil IV	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	150.000.000	Pokir ELFA SUSANTI, S.ST
1	0	0	2	2.0	0	0	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Dapil III	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	200.000.000	Pokir H.INSAN SABRI
1	0	0	2	2.0	0	0	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jorong Mahakarya	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	200.000.000	Pokir H.ERIANTO, SE
1	0	0	2	2.0	0	0	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Luhak Nan Duo	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	20.000.000	Pokir SUBANDRIO, SH
1	0	0	2	2.0	0	1	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jorong Ophir	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	20.000.000	Pokir SUBANDRIO, SH
1	0	0	2	2.0	0	1	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jorong Giri maju	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	20.000.000	Pokir SUBANDRIO, SH
1	0	0	2	2.0	0	1	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Dapil 1	Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	200.000.000	Pokir H.ADRIWILZA,SE, M.Pd,M.Si

Kode						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol ume	Catatan
1						2	3	4	5	6
1	0 6	0 2	2.0 3	0 1	1 3	Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kecam atan Sungai Aur	Jumlah kegiatan peningkata n kesejahtera an masyarakat	200.000.000	Pokir H. INSAN SABRI

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Sesuai dengan tugas dan Pokoknya Kementerian Sosial RI bersama instansi yang ada di Provinsi dan Kabupaten /Kota bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bersama dengan Kementerian /Lembaga terkait.

Dinas Sosial sebagai OPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPJMD sebagai berikut :

Program prioritas dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan adalah :

- 1) Pengendalian terpadu penanganan kemiskinan
- 2) peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari
- 3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 5) Pemberdayaan Fakir Miskin
- 6) Program Koordinasi Bidang Ksejahteraan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu penelataran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang / terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yaitu tergantungnya salah satu konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;
- f. Korban tidak kekerasan, eksloitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Berdasarkan telaahaan terhadap Renstra Kemensos yang berdasarkan Permensos nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa :

- a. Tantangan utama dan permasalahan yang akan dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan, yaitu :
 1. Memastikan Hidup yang berkualitas dan bermartabat
 - Rendahnya kualitas dan ketersedian pangan
 - Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum
 - Keterbatasan akses pelayanan pendidikan
 - Keterbatasan akses pelayanan kesehatan
 - Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak
 - Keterbatasan akses terhadap sumber energi
 - Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non - ASN
 2. Memastikan Kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi
 - Keterbatasan sumber daya finansial
 - Keterbatasan kemampuan SDM pengelola
 - Keterbatasan sumber pemasaran produk
 3. Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigaasi serta perlindungan sosial
 - Penanganan resiko sosial yang belum responsif
 - Keterbatasan pendampingan pelayanan
 - Diskriminasi sosial bagi kelompok PPKS (penyandang disabilitas, lansia, korban bencana)
 - i. Kerangka Kelembagaan dan pembangunan kesejahteraan sosial Kelembagaan SLRT dan Puskesos dalam rangka mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai pusat data dan sasaran program penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal.
 - ii. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.
 - iii. Pembiayaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial
- b. Sasaran strategis pembangunan sosial
 1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
 2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
 3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
- c. Major Project terkait sosial adalah
 1. Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh melalui :
 - Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial non tunai
 - Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan
 2. Percepatan penurunan kematian ibu dan prevalensi stunting, dengan :
 - Menurunkan angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup
 - Menurunkan prevalensi stunting hingga 13 %

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan misi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial tahun 2022, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

Berdasarkan tujuan diatas, dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target						Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	75	80	85	90	95	100	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	75	80	85	90	95	100	
2	Meningkatkan Penanganan Korban Bencana alam dan Sosial	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab / kota	75	80	85	90	95	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	
			Persentase Penurunan Temuan BPK	75	80	85	90	95	100	

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Sosial
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI: Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera			
MISI I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1 Penguatan pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan a. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan	1 Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi setiap kegiatan 2 Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Sosial Di Kabupaten Pasaman Barat
MISI II: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Penanganan Korban bencana Alam dan Sosial	1.1 Masyarakat yang Tangguh menghadapi bencana	2.5. Meningkatkan upaya pencegahan dan tanggap darurat serta penanggulangan bencana 2.6. Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana	1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana bagi korban bencana serta terpenuhi kebutuhan dasarnya 3 Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana 4 Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban

			bencana kabupaten / kota.
MISI III : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS atau pelayanan Rehabilitasi Sosial	1.1 Pengentasan Kemiskinan 1.2 Meningkatkan Penyediaan kebutuhan dasar PPKS Luar Panti	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti. 3. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti. 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang sosial berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2026 dengan Visi : Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermatrabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 teruang dalam 5 (Lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan.

Rekapitulasi program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat :

- a. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial
Tujuan :
 1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
 2. Meningkatkan Penanganan Korban Bencana alam dan Sosial
 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
2. Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan Akuntabel
- b. Nama Program dan Kegiatan yang Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial
 - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - II. Program Penanganan Bencana
 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
 - III. Program Rehabilitasi Sosial
 1. Kgiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
 - IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota
 - V. Program Pemberdayaan Sosial
 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat yaitu dalam pengentasan kemiskinan, terdapat Program yang ada pada rancangan awal namun dengan adanya perubahan nomenklatur yaitu Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat terdampak Program Pemugaran hal ini sebabkan karena kegiatan tersebut bukan kewenangan dari Dinas Sosial. Tabel rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan Tabel T-C.3.3

Tabel 3.3.1 (T-C.33.)
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan
 Maju Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,253,881,498				9,745,724,447
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	3,026,644,127			100%	7,332,818,404
1	6	1	0 2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	2,000,000			100%	2,200,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			
1	6	1	0	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	2,200,000	
1	6	1	0	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan		100%	1,990,068,236			6,192,584,926	
1	6	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Orang/bulan	1,508,723,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Orang/bulan	1,659,595,630	
1	6	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Dokumen	404,394,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	4,448,344,296

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	6	1	0 2	0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	76,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	84,645,000	
1	6	1	0 2	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Sosial		30 Unit	9,197,500		30 Unit	10,117,250	
1	6	1	0 2	0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	9,197,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	10,117,250	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	0	0	1	2	0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	9 Orang	164,120,318			9 Orang	180,532,349
1	0	0	1	2	0 5 9	Pendidikan Pelatihan Berdasarkan dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Pegawai Tugas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	19,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Orang 21,505,000
1	0	0	1	2	0 5 1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	71,844,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Orang 79,028,400

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	0	0	1	2	0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	72,726,318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	79,998,949
1	0	0	1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	321,185,043		100%	353,303,546

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	0	0	1	2	0	0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	12,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	14,058,000	
1	0	0	1	2	0	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	74,376,503	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	81,814,153	
1	0	0	1	2	0	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,526,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	22,578,672	
1	0	0	1	2	0	0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	37,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	41,459,000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10				
1	0	0	1	2	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	175,812,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	193,393,721	
1	0	0	1	2	0	0	7	Pengadaan Milik Penunjang Pemerintah	Barang Daerah Urusan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		30 Unit	123,576,090		30 Unit	135,933,699
1	0	0	1	2	0	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	123,576,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	135,933,699	
1	0	0	1	2	0	0	8	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor		100%	75,396,940		100%	82,936,634

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	0	0	1	2	0	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	42,246,940	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	46,471,634
1	0	0	1	2	0	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	33,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Laporan	36,465,000
1	0	0	1	2	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	40 Unit	341,100,000			40 Unit	341,100,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10				
1	0	0	1	2	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	63,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	69,300,000
1	0	0	1	2	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	15,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	16,610,000
1	0	0	1	2	0	9	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	263,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	289,300,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	0	0	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Binaan - LKS Lanjut Usia Binaan - LKS Penyandang Disabilitas Binaan - % Karang taruna aktif		12,0,0,12 LKS/	521,257,046			12,0,0,1 2 LKS/	521,257,046
1	0	0	2	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	521,257,046	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		85%	521,257,046
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Potensi Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	170,693,226	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	50 Orang	176,519,750

Kode						Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								(Tahun Rencana)					Target	Kebutuhan
-1				-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
1	0	0	2	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	192,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	211,835,800	
1	0	0	2	2	0	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sertifikat	157,985,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Sertifikat	173,784,402	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	0	0	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		100%	1,208,030,809			0,523	1,310,922,523		
1	0	0	6	4	2	0	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan, anak dan korban sosial lainnya		85%	1,208,030,809		85%	1,310,922,523

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	0	0	2	0	0	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	154,332,309	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		150 Orang	143,709,973	
1	0	0	2	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	790,644,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		50 Orang	869,708,950	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
1	0	0	4	2	0	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	00 202,276,0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	222,503,600
1	0	0	4	2	0	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	0 60,778,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	75,000,000
1	0	0	5				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		85%	366,314,436		85%	395,044,980

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	0 6	0 5	2	0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase data yang telah dikelola		100%	366,314,436			100%	395,044,980
1	0 6	0 5	2	0 2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,514 Data	91,514,436	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		92671 Orang	92,764,980
1	0 6	0 5	2	0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69194 Keluarga	274,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		69194 Keluarg	302,280,000
1	0 6	0 6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat		100%	131,635,080			100%	144,798,588

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
					bencana daerah kab/kota (SPM)								
1 0 6	0 6	0 6	2 2	0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	131,635,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Orang	144,798,588	
1 0 6	0 6	0 6	2 2	0 1 0 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	131,635,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Orang	144,798,588	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan bidang urusan pemerintah yaitu Bidang Urusan Sosial. Untuk program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan serta rencana tahun 2023 yang meliputi lokasi program / kegiatan, target capaian kinerja, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta perkiraan maju tahun 2024. Berikut ini tabel rumusan berikut dengan kodefikasi subkegiatan yang mendukung pencapaian SPM dan atau program Unggulan (Progul) Daerah, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
 Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Sosial

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
			Tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial									
			Sasaran Terwujudnya a birokrasi bersih akuntabel									
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,253,881,498				9,745,724,447	

Kode					Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	3,026,644,127			100%	7,332,818,404		
1	6	1	02	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	2,000,000			100%	2,200,000		
1	6	1	02	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	2,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		10 Laporan	2,200,000	
1	6	1	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan		100%	1,990,068,236				6,192,584,926	

Kode							Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1					-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	6	1	0	2	0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Orang/bulan	1,508,723,300	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	18 Orang/bulan	1,659,595,630	
1	6	1	0	2	0	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Dokumen	404,394,936	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	48 Dokumen	4,448,344,296	
1	6	1	0	2	0	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	76,950,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	84,645,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	6	1	0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Sosial		30 Unit	9,197,500			30 Unit	10,117,250	
1	6	1	0	0	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	9,197,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Unit	10,117,250	
1	0	0	1	2	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	9 Orang	164,120,318		9 Orang	180,532,349	

Kode					Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	0	0	1	2	0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	19,550,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	5 Orang	21,505,000	
1	0	0	1	2	0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	71,844,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	10 Orang	79,028,400	

Kode						Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	0	0	1	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	72,726,318	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		10 Orang	79,998,949	
1	0	0	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	321,185,043			100%	353,303,546	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	0	0	1	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	12,780,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		1 Paket	14,058,000	
1	0	0	1	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	74,376,503	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		1 Paket	81,814,153	
1	0	0	1	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,526,066	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		1 Paket	22,578,672	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	0	0	1	2	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	37,690,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	1 Paket	41,459,000	
1	0	0	1	2	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	175,812,474	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	30 Laporan	193,393,721	
1	0	0	1	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		30 Unit	123,576,090		30 Unit	135,933,699	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	0	0	1	2	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	123,576,090	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	10 Unit	135,933,699	
1	0	0	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor		100%	75,396,940		100%	82,936,634	
1	0	0	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	42,246,940	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	12 Laporan	46,471,634	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	0	0	1	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	33,150,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		10 Laporan	36,465,000	
1	0	0	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		40 Unit	341,100,000			40 Unit	341,100,000	
1	0	0	1	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	63,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		21 Unit	69,300,000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11		
1	0	0	1	2	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	15,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	21 Unit	16,610,000	
1	0	0	1	2	0	9	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	263,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Unit	289,300,000	
1	0	0	2						PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Binaan - LKS Lanjut Usia Binaan - LKS Penyandang Disabilitas Binaan - % Karang taruna aktif		12,0,0,12 LKS/	521,257,046		12,0,0,12 LKS/	521,257,046	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11		
1	0	0	2	2	0	3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%	521,257,046	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	85%	521,257,046		
1	0	0	2	2	0	3	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	170,693,226	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	50 Orang	176,519,750	
1	0	0	2	2	0	3	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	192,578,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	30 Orang	211,835,800	

Kode					Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	06	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sertifikat	157,985,820	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	10 Sertifikat	173,784,402	
						Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS								
						Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Sosial Bagi PMKS								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11		
1	0	0	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	1,208,030,809			0,523	1,310,922,523	1.01		
1	0	0	6	4	2	0	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	1,208,030,809			85%	1,310,922,523	1.01

Kode						Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1						-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	0	0	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	154,332,309	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		150 Orang	143,709,973	1.01
1	0	0	0	2	0	Penyediaan Bantu Alat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	00 790,644,5	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		50 Orang	869,708,950	1.01
1	0	0	0	2	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	00 202,276,0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		25 Orang	222,503,600	1.01

Kode						Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana		Kode fikasi	
								(Tahun Rencana)					Target	Kebutuhan		
Lokasi		Capaian	Dana/Pagu	Dana	Capaian	Dana/	Pagu	Indikatif	Indikatif				Target	Kebutuhan		
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11		
1	0	0	0	2	0	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	0	60,778,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	100 Orang	75,000,000	
1	0	0	0	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		85%		366,314,436		85%	395,044,980	2.04	
1	0	0	0	2	0	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang telah dikelola		100%	366,314,436		100%	395,044,980	2.04	

Kode						Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
								(Tahun Rencana)					Target	Kebutuhan	
-1				-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	0	0	5	2	0	1	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,514 Data	91,514,436	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	92671 Orang	92,764,980	2.04	
1	0	0	5	2	0	2	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69194 Keluarga	274,800,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	69194 Keluarga	302,280,000	2.04	
							Tujuan Meningkatkan Penangan Korban bencana alam dan sosial								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
					Sasaran Meningkatnya Penanganan Korban bencana alam dan sosial									
1	0 6	0 6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (SPM)		100%	131,635,080			100%	144,798,588	1.01
1	0 6	0 6	2	0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasama n Barat, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	150 Orang	131,635,080	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum		150 Orang	144,798,588	1.01

Kode	Urusan/Bidang	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kode fikasi
			(Tahun Rencana)					Target	Kebutuhan	
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1 0 6 0 6 2 0 1 0 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	131,635,080	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	150 Orang	144,798,588	1.01	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini merupakan kegiatan, Program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Sosial pada Tahun 2023 mencakup 10 Kegiatan dalam 5 Program untuk mencapai 3 sasaran dan 3 tujuan. Namun demikian yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapai masyarakat Pasaman Barat yang sejahtera, demokratis dan agamais.

Simpang Empat, Juli 2022

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



NIP. 19651004 198802 1 001